



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan

Telp. 021-5253004 / Fax. 021-5253048

Website: www.kemenkumham.go.id

Nomor : SEK.1-OT.03.03-348

13 Juni 2023

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Hal : Penyampaian Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi
Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023

Yth. Para Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di tempat

Menindaklanjuti Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH-13.OT.03.01 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2020 – 2024 serta persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023, bersama ini disampaikan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Level Meso, Reformasi Birokrasi General, dan Reformasi Birokrasi Tematik (matrik terlampir) agar dapat dilaksanakan sesuai target kegiatan yang telah ditetapkan.

Berkenaan dengan hal dimaksud, dimohon bantuan Saudara agar mengunggah data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi ke dalam aplikasi ***Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)*** untuk periode triwulan I dan II (B03 dan B06) **paling lambat hari Jumat tanggal 30 Juni 2023** guna dilakukan monitoring dan evaluasi oleh Tim Evaluator Internal Kementerian Hukum dan HAM.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Biro Perencanaan



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Ida Asep Somara
NIP 197101021994031001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal.

Lampiran I
 Nomor : SEK.1-OT.03.03-348
 Tanggal : 13 Juni 2023

**RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI LEVEL MESO TAHUN 2023-2024
 SESUAI PERAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 3 TAHUN 2023**

No.	Peran Kemenkumham dalam Pelaksanaan RB Level Meso/Kegiatan Utama untuk RB Level Meso	Rincian Kegiatan		Indikator <i>Output</i> dari Rincian Kegiatan		Target		Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Data Dukung/ Bukti Capaian
						2023	2024	2023	2024	Kanwil dan UPT	
I	Sinergitas regulasi berbasis simplifikasi										
I.1	Penyusunan rekomendasi, pemantauan, dan peninjauan serta perancangan peraturan perundang- undangan	k	Penyusunan Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	k.1	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah		33		B12	Kantor Wilayah	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
		l	Fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah	l.1	Jumlah fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah		33		B12	Kantor Wilayah	Laporan kegiatan fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah

Lampiran II
 Nomor : SEK.1-OT.03.03-348
 Tanggal : 13 Juni 2023

**RENCANA AKSI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI GENERAL KEMENKUMHAM TAHUN 2023-2024
BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 3 TAHUN 2023**

No.	Sasaran (Immediate Outcome)/Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan		Indikator <i>Output</i> dari Rincian Kegiatan		Target		Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Data Dukung/Bukti Capaian
						2023	2024	2023	2024	Kanwil dan UPT	
SS.1	Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel										
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi										
K.2	Penyelarasan Proses bisnis dan SOP	RK.6	Evaluasi Standar Operasi Prosedur	IO.6.1	Jumlah laporan Evaluasi Standar Operasi Prosedur	2	2	B06, B12	B06, B12	Kanwil dan UPT	Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik										
K.3	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	RK.12	Implementasi Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.12.1	Jumlah Laporan pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Laporan pelaksanaan)	-	1		B12	Kanwil dan UPT	1 Laporan pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Laporan pelaksanaan)
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional										

K.4	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional (note: berdasarkan roadmap SPBE Kemenkumham tahun 2023-2024)	RK.25	Pembentukan Tim Tata Kelola SPBE	IO.25.1	Jumlah laporan pembentukan tim tata kelola SPBE	1	1	B03	B03	Kantor Wilayah dan UPT	SK Tim dan Rapat Pembentukannya (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah										
K.5	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	RK.28	Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 (standar kinerja berbasis logic model sesuai ketentuan PermenPANRB nomor 89 tahun 2021)	IO.28.1	Jumlah Keputusan Sekjen/Keputusan Itjen/Keputusan Ditjen/Keputusan Badan tentang Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024	1	1	UKE I B09	Kanwil I dan UPT (B06)	Kanwil dan UPT	Dokumen Peraturan Sekjen/Peraturan Itjen/Peraturan Ditjen/Peraturan Badan tentang Rencana Strategis Perubahan Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024
		RK.31	Coaching and Mentoring secara berkala pada setiap bagian dengan agenda: - evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan (12 laporan) - perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan (12 laporan) - penguatan integritas organisasi (1 laporan)	IO.31.1	Jumlah Dokumentasi dan Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas)	25	25	B03, B06, B09, B12	B03, B06, B09, B12	Kanwil dan UPT	- 12 Laporan evaluasi pelaksanaan kegiatan 1 bulan - 12 laporan perencanaan pelaksanaan kegiatan 1 bulan - 1 laporan penguatan integritas organisasi
		RK.33	Monitoring, evaluasi, pelaporan kinerja dan keuangan secara periodik melalui (e-monev, SMART, e-tarja dan e-Performance)	IO.33.1	Jumlah laporan hasil Monev pelaporan kinerja dan keuangan (laporan)	4	4	B03, B06, B09, B12	B03, B06, B09, B12	Kanwil dan UPT	- 1 Laporan e-monev - 1 Laporan SMART - 1 Laporan e-tarja - 1 Laporan e-Performance

		RK.34	Monitoring dan evaluasi Perjanjian Kinerja, dan Target Kinerja	IO.34.1	Jumlah Laporan Monitoring dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja (laporan)	4	4	B03, B06, B09, B12	B03, B06, B09, B12	Kanwil dan UPT	4 Laporan Monitoring dan Rekomendasi Hasil Evaluasi Perjanjian Kinerja dan Target Kinerja (per 3 bulan 1 laporan)
		RK.36	Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM	IO.36.1	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM (laporan)	1	1	B03	B03	Kanwil dan UPT	1 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kementerian Hukum dan HAM
		RK.37	Penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Tahun 2022	IO.37.1	Jumlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Tahun 2022	1	1	B03	B03	Kanwil dan UPT	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Tahun 2022
		RK.38	Publikasi Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja pada website Kemenkumham	IO.38.1	Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja yang dipublikasikan pada website Kemenkumham	3	3	B03, B09	B03, B09	Kanwil dan UPT	- 1 Dok publikasi DIPA (Biro Keuangan) (B03) - 1 Dok publikasi Renstra (Biro Perencanaan) (B09) - 1 Dok Publikasi LKjIP (Biro Perencanaan) (B03)
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (Digital Services)										
K.6	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	RK.42	Sosialisasi/publikasi 6 komponen <i>service delivery</i> dalam dokumen standar pelayanan	IO.42.1	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi/publikasi 6 komponen <i>service delivery</i> dalam dokumen standar pelayanan	1	1	B06	B06	Kanwil dan UPT	1 Laporan pelaksanaan Sosialisasi/publikasi 6 komponen <i>service delivery</i> dalam dokumen standar pelayanan

		RK.43	Publikasi maklumat pelayanan	IO.43.1	Jumlah laporan publikasi maklumat pelayanan	1	1	B06	B06	Kanwil dan UPT	1 Laporan publikasi maklumat pelayanan
		RK.44	Publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	IO.44.1	Jumlah laporan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat	1	1	B03, B06, B09, B12	B03, B06, B09, B12	Kanwil dan UPT	1 Laporan publikasi hasil Survei Kepuasan Masyarakat
		RK.45	Internalisasi standar pelayanan	IO.45.1	Jumlah laporan internalisasi standar pelayanan	1	1	B09	B09	Kanwil dan UPT	1 Laporan internalisasi standar pelayanan
		RK.47	Penyusunan dan evaluasi dokumen standar pelayanan publik	IO.47.1	Jumlah dokumen standar pelayanan dan laporan evaluasi	2	2	B09	B09	Kanwil dan UPT	- 1 Dokumen standar pelayanan - 1 Laporan evaluasi standar pelayanan
		RK.48	Publikasi dokumen standar layanan melalui <i>website</i>	IO.48.1	Jumlah laporan publikasi dokumen standar layanan melalui <i>website</i>	1	1	B09	B09	Kanwil dan UPT	1 Laporan publikasi dokumen standar layanan melalui <i>website</i> atau sosial media
		RK.49	Penanganan pengaduan masyarakat melalui aplikasi LAPOR	IO.49.1	Jumlah laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui E-LAPOR	2	2	B06, B09	B06, B09	Kanwil dan UPT	2 Laporan Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui E-LAPOR

		RK.50	Peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau	IO.50.1	Jumlah laporan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis elektronik	2	2	B06, B12	B06, B12	Kanwil dan UPT	Rekapitulasi pelayanan berbasis IT dan <i>capture</i> seluruh layanan <i>online</i>
		RK.53	Pelaksanaan kampanye publik dengan pembuatan bahan-bahan informasi (<i>website</i> , media sosial, pamflet, brosur, <i>banner</i> , dll)	IO.53.1	Jumlah laporan pelaksanaan kampanye publik	2	2	B06, B12	B06, B12	Kanwil dan UPT	2 Laporan pelaksanaan kampanye publik
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan										
K.7	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja (RK disusun berdasarkan tahapan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Permenpan RB no 90 tahun 2021)	RK.56	Pencanangan Zona Integritas	IO.56.1	Jumlah laporan pencanangan Zona Integritas (ZI)	1	1	B03	B03	Kanwil dan UPT	Laporan pencanangan Zona Integritas (ZI)
		RK.58	Pembangunan unit kerja WBK/WBBM	IO.58.1	Jumlah laporan pembangunan unit kerja WBK/WBBM	4	4	B03, B06, B09, B12	B03, B06, B09, B12	Kanwil dan UPT	Laporan monitoring pembangunan Zona Integritas unit kerja WBK/WBBM
K.8	Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	RK.63	Pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai internal SPIP 2023	IO.63.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tim penilai internal SPIP 2023	-	1		B09	Kantor Wilayah Banten dan D.I. Yogyakarta	- 1 Laporan pelaksanaan TL atas rekomendasi Evaluasi SPIP

		RK.64	Pelaksanaan Manajemen Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	IO.64.1	Jumlah dokumen penerapan penanganan risiko Risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Identifikasi risiko, evaluasi risiko, rencana penanganan risiko)	1	1	B09	B03	Kanwil dan UPT	Dokumen penerapan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (Identifikasi risiko, evaluasi risiko, rencana penanganan risiko)
				IO.64.3	Jumlah laporan pelaksanaan kapabilitas manajemen risiko di lingkunganKemenkumham	1	1	B09	B09	Kanwil dan UPT	Laporan pelaksanaan kapabilitas manajemen risiko (Nilai Maturitas Risiko Indeks/MRI) di lingkungan Kemenkumham
				IO.64.4	Jumlah kegiatan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM	2	2	B06, B12	B06, B12	Kanwil dan UPT	Laporan pelaksanaan kegiatan pemantauan penanganan risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM (hasil)
		RK.67	Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal dan internal	IO.67.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut hasil audit eksternal terhadap Kementerian Hukum dan HAM	1	1	B09	B09	Kanwil dan UPT	Laporan pelaksanaan tindak lanjut yang dilaksanakan Kementerian Hukum dan HAM atas hasil audit eksternal
				IO.67.2	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut audit internal terhadap Kementerian Hukum dan HAM	1	1	B09	B09	Kanwil dan UPT	Laporan pelaksanaan tindak lanjut audit internal

		RK.68	Pembentukan Tim Satgas tentang penyelenggaraan SPIP	IO.68.1	Jumlah laporan pembentukan Tim Satgas tentang penyelenggaraan SPIP	1	1	B03	B03	Kanwil dan UPT	SK Penyelenggaraan SPIP (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
K.10	Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	RK.76	Pembentukan Tim Benturan Kepentingan	IO.76.1	Jumlah laporan pembentukan Tim Benturan Kepentingan	1	1	B03	B03	Kanwil dan UPT	SK Tim Benturan Kepentingan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
		RK.77	Sosialisasi Benturan Kepentingan	IO.77.1	Jumlah laporan Sosialisasi Benturan Kepentingan	1	1	B06	B06	Kanwil dan UPT	Laporan sosialisasi Benturan Kepentingan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
		RK.78	Evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan	IO.78.1	Jumlah laporan Evaluasi dan tindak lanjut benturan kepentingan	4	4	B03, B06, B09, B12	B03, B06, B09, B12	Kanwil dan UPT	Laporan dan rekomendasi hasil evaluasi Benturan Kepentingan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi										
K.13	Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	RK.94	Penyusunan Rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	IO.94.1	Jumlah rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	-	33		B12	Kantor Wilayah	Dokumen rekomendasi hasil analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah
		RK.95	Fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah	IO.95.1	Jumlah fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah	-	33		B12	Kantor Wilayah	Laporan kegiatan fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah di wilayah

S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral										
K.14	Pelaksanaan Arsip Digital *(Tahapan disusun sesuai Per ANRI nomor 6 tahun 2021)	RK.13 6	Pembentukan tim pengawasan kearsipan	IO.136.1	Jumlah laporan pembentukan tim pengawasan kearsipan	1	1	B03	B03	Kanwil dan UPT	SK tim pengawasan kearsipan (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
		RK.13 7	Pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	IO.137.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip	4	4	B09	B09	Kanwil dan UPT	Laporan pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Kemenkumham
K.15	Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)	RK.14 3	Pembentukan tim pelaksana alihmedia arsip dilingkungan kementerian hukum dan ham	IO.143.1	Jumlah laporan pembentukan tim pelaksana alihmedia arsip dilingkungan kementerian hukum dan ham	1	1	B03	B03	Kanwil dan UPT	SK tim pelaksana alihmedia arsip (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
		RK.14 4	Alih media arsip manual dengan jra berketerangan permanen	IO.144.1	Jumlah alih media arsip manual dengan jra berketerangan permanen	4	4	B12	B12	Kanwil dan UPT	Daftar arsip yang dilakukan alihmedia (berdasarkan Perka ANRI);
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset										
K.18	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	RK.15 4	Penyusunan usulan penetapan status penggunaan BMN	IO.154.1	Penyusunan usulan penetapan status penggunaan BMN	2	2	B06, B12	B06, B12	Kanwil dan UPT	Usulan penetapan status penggunaan BMN

		RK.15 7	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	IO.157.1	Pelaksanaan pengamanan BMN (pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara)	1	1	B12	B12	Kanwil dan UPT	Rekapitulasi data pengasuransian gedung dan pemasangan tanda pengaman tanah & rumah negara, Sertifikat Hak Tanah, Rekapitulasi Data Tanah, Laporan Penyelesaian Sengketa
		RK.16 2	Pengawasan dan pengendalian BMN	IO.162.1	Pengawasan dan pengendalian BMN	2	2	B03, B09	B03, B09	Kanwil dan UPT	1. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN Tahunan Tahun 2022 (B03) 2. Laporan pengawasan dan pengendalian BMN Semester I (B09)
		RK.17 0	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2022 <i>Unaudited</i>	IO.170.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2022 <i>Unaudited</i>	1	-	B.03		Kanwil dan UPT	Laporan Keuangan TA. 2022 <i>Unaudited</i>
		RK.17 1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2023 <i>Unaudited</i>	IO.171.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM TA. 2023 <i>Unaudited</i>	-	1		B.03	Kanwil dan UPT	Laporan Keuangan TA. 2023 <i>Unaudited</i>
		RK.17 2	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Keuangan TA. 2022 <i>Audited</i>	IO.172.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Keuangan TA. 2022 <i>Audited</i>	1	-	B.06		Kanwil dan UPT	Laporan Keuangan TA. 2022 <i>Audited</i> dan Notula Rapat penyusunan Laporan Keuangan

		RK.17 3	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Keuangan TA. 2023 <i>Audited</i>	IO.173.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Keuangan TA. 2023 <i>Audited</i>	-	1		B.06	Kanwil dan UPT	Laporan Keuangan TA. 2023 <i>Audited</i> dan Notula Rapat penyusunan Laporan Keuangan
		RK.17 4	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2023	IO.174.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2023	1	-	B.09		Kanwil dan UPT	Laporan Keuangan Semester I TA. 2023
		RK.17 5	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2024	IO.175.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Semester I TA. 2024	-	1		B.09	Kanwil dan UPT	Laporan Keuangan Semester I TA. 2024
		RK.17 6	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III 2023	IO.176.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III 2023	1	-	B.12		Kanwil dan UPT	Laporan Keuangan Triwulan III 2023
		RK.17 7	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III 2024	IO.177.1	Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan HAM Triwulan III 2024	-	1		B.12	Kanwil dan UPT	Laporan Keuangan Triwulan III 2024
		RK.17 8	Monitoring dan Evaluasi Realisasi Anggaran	IO.178.1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Realisasi Anggaran	4	4	B03, B06, B09, B12	B03, B06, B09, B12	Kanwil dan UPT	Laporan dan rekomendasi hasil monev realisasi anggaran (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)

		RK.17 9	Pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi revidi tim pemeriksa internal (pemeriksaan keuangan)	IO.179.1	Jumlah laporan pelaksanaan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi revidi tim pemeriksa internal (pemeriksaan keuangan)	1	1	B09	B09	Kanwil dan UPT	Laporan tindak lanjut rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi (undangan rapat, notula, daftar hadir dan dokumentasi)
SS.2	Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional										
S.12	Terwujudnya percepatan peningkatan kapasitas pegawai ASN										
K.21	Percepatan peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM ASN Bidang Hukum dan HAM	RK.20 2	Perencanaan penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan	IO.202.1	Jumlah laporan pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan		1		B03	UPT	Jumlah laporan pelaksanaan perencanaan penyelenggaraan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan
		RK.20 3	Pelaksanaan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan	IO.203.1	Jumlah laporan pelaksanaan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan		1		B12	UPT	Jumlah laporan pelaksanaan Diklat Hukum dan HAM di kewilayahan
S.15	Terwujudnya sistem kesejahteraan ASN yang adil, layak, dan berbasis kinerja										
K.24	Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	RK.21 6	Penyusunan standar kinerja SDM ASN Kemenkumham yang selaras dengan kinerja organisasi	IO.216.1	Jumlah laporan pelaksanaan penyusunan standar kinerja SDM ASN Kemenkumham yang selaras dengan kinerja organisasi	1	1	B12	B12	Kanwil dan UPT	Laporan pelaksanaan penyusunan standar kinerja SDM ASN Kemenkumham yang selaras dengan kinerja organisasi

		RK.21 7	Pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham (SKP dan Perilaku)	IO.217.1	Jumlah laporan pelaksanaan pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham (SKP dan Perilaku)	1	1	B12	B06	Kanwil dan UPT	Laporan pelaksanaan pengukuran kinerja SDM ASN Kemenkumham (<i>sampling</i> SKP dan Perilaku)
		RK.21 8	Monitoring dan evaluasi kinerja SDM ASN Kemenkumham berdasarkan kinerja	IO.218.1	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SDM ASN Kemenkumham berdasarkan kinerja		2		B09, B12	Kanwil dan UPT	Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja SDM ASN Kemenkumham berdasarkan kinerja
S.16	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN										
K.28	Menerapkan prinsip- prinsip manajemen ASN secara profesional	RK.22 8	Pendampingan penyusunan analisis jabatan dan evaluasi ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM	IO.228.1	Jumlah laporan pendampingan penyusunan analisis jabatan dan evaluasi ketatalaksanaan Kementerian Hukum dan HAM	1	1	B06	B06	Kanwil dan UPT	Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)
K.29	Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN	RK.23 0	Monitoring dan evaluasi implementasi peningkatan disiplin pegawai	IO.230.1	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi implementasi peningkatan disiplin pegawai	2	2	B06, B12	B06, B12	Kanwil dan UPT	Laporan monitoring dan evaluasi implementasi peningkatan disiplin (Sesuai Tata Naskah Dinas)
		RK.23 1	Internalisasi dan publikasi kode Etik Pegawai	IO.231.1	Jumlah laporan internalisasi dan publikasi Kode Etik Pegawai	2	2	B06, B12	B06, B12	Kanwil dan UPT	Laporan (Sesuai Tata Naskah Dinas) dilengkapi dengan (Undangan Rapat, Notula, Daftar Hadir, dan Dokumentasi)/Laporan kegiatan apel pagi dan <i>sore/coffee</i>

											<i>morning/rapat internal/diklat/workshop/dll</i>
		RK.23 2	Melakukan <i>public campaign</i> penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	IO.232.1	Jumlah laporan <i>public campaign</i> penegakan disiplin untuk internal pegawai masing-masing satker	1	1	B09	B09	Kanwil dan UPT	<i>Capture</i> bukti kegiatan <i>public campaign</i> berupa pemasangan atau penyebaran flyer/baliho/banner/poster

Lampiran III

Nomor : SEK.1-OT.03.03-348

Tanggal : 13 Juni 2023

**RENCANA KERJA TAHUNAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK KEMENKUMHAM TAHUN 2023-2024
BERDASARKAN PERMENPAN RB NOMOR 3 TAHUN 2023**

No.	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)/Kegiatan Utama	Rincian Kegiatan		Indikator <i>Output</i> dari Rincian Kegiatan		Target		Waktu Pelaksanaan		Penanggung Jawab	Data Dukung/Bukti Capaian
						2023	2024	2023	2024	Kanwil dan UPT	
SS.T.I	Meningkatnya pelaksanaan RB Tematik Kemenkumham										
ST.2	Kontribusi Kemenkumham dalam Peningkatan Investasi										
KT.3	Pengelolaan layanan keimigrasian untuk menarik investor dalam mendukung peningkatan investasi	RKT. 4	Pengelolaan layanan keimigrasian	IO RKT.4	Jumlah laporan layanan keimigrasian	9	9	B03, B06, B09, B12	B03, B06, B09, B12	Kantor Wilayah dan UPT Imigrasi	- Laporan Layanan Visa - Laporan laytanan pembinaan TPI - Laporan Layanan Izin Tinggal Keimigrasian yang diselesaikan - Laporan Layanan PKS Keimigrasian yang ditindaklanjuti - Laporan Layanan keimigrasian oleh pejabat imigrasi di luar negeri dan tempat lainnya - Laporan Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian yang diselesaikan - Laporan Layanan Keimigrasian di kewilayahan yang diselesaikan - Laporan Pembinaan UPT keimigrasian di kewilayahan - Pemeriksaan Keimigrasian di TPI
KT.4	Pengelolaan layanan Kekayaan Intelektual (KI) dalam meningkatkan perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	RKT. 5	Pengelolaan layanan Kekayaan Intelektual	IO RKT.5	Jumlah laporan layanan Kekayaan Intelektual	6	6	B03, B06, B09, B12	B03, B06, B09, B12	Kantor Wilayah	- Layanan Hak Cipta dan Desain Industri - Layanan Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang - Layanan Merek dan Indikasi Geografis - Layanan Kerja Sama Kekayaan Intelektual - Layanan TIK sebagai enabler layanan KI - Layanan KI di kewilayahan

